

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam studi-studi tentang *public relations* (untuk selanjutnya dalam penelitian ini akan ditulis PR) selama bertahun-tahun, aktivisme dipahami sebagai sesuatu yang berada diluar kajian PR. PR hanya dikaji sebagai sebuah profesi dan fungsi manajemen dalam organisasi dan industri. Selama bertahun-tahun PR hanya fokus dianggap sebagai sebuah kebutuhan komunikasi dari bisnis swasta atau pemerintah. Peran sosial kulturalnya dalam kehidupan sehari-hari tidak banyak diakui. Padahal, PR mengklaim dirinya sebagai serangkaian keterampilan yang unik dan kuat, serta berjuang dengan identitasnya tersebut seperti yang tercermin dalam proses aktivisme. Meskipun ada beberapa bahasan aktivisme dalam kajian PR, selama ini hanya dipandang sebagai sebuah aktivitas konfrontasional. Dianggap sebagai pencipta konflik yang menjadi cara paling efektif untuk mendapatkan kekuasaan dan membangun legitimasi atau institusi masyarakat yang dominan. Padahal, aktivisme telah lama menjadi komponen penting dari masyarakat sipil global. Aktivisme yang sehat menjadi proses untuk mendorong perubahan sosial. Aktivisme beroperasi secara independen dari pemerintah dan bisnis untuk memberikan suara kepada masyarakat yang tidak bersuara. Aktivisme bahkan dianggap memiliki kesempatan besar untuk menjadi kekuatan positif di dunia (Brooks, Wakefield, and Plowman 2018).

Selama ini aktivisme digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengkampanyekan demokrasi, menentang rasisme, menentang kediktatoran, mengakhiri perbudakan, melindungi hak-hak pekerja, dan memperjuangkan banyak hak sipil dan masalah politik lainnya. Aktivisme dimaknai sebagai upaya yang terkoordinasi dari suatu kelompok yang mengorganisir secara sukarela dalam upaya pemecahan masalah yang mengancam kepentingan bersama anggota kelompok. Dalam proses pemecahan

masalah tersebut, kelompok ini membuat dan mempertahankan identitas kolektif serta memobilisasi sumber daya dan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan entitas yang menyebabkan masalah itu terjadi. Seperti masalah pendidikan, negosiasi, persuasi, taktik tekanan atau pemaksaan. (Brooks et al. 2018)

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Thompson (2016), "*Towards a theory of rent-seeking in activist Public Relations*", ia menggunakan sebuah pendekatan yang tidak biasa dan kritis serta menawarkan interpretasi baru dalam dinamika masyarakat. Dalam artikel ini, aktivisme dianggap menjadi bagian dari PR, bahkan sebagai bagian dari sejarah PR. Meskipun hingga saat ini, beberapa kelompok masih beranggapan bahwa aktivisme dan PR berbeda secara ideologis, namun sebagian yang lain berusaha mengintegrasikan aktivisme dengan PR. Bahkan, kehadiran aktivisme dalam PR dianggap akan mengoptimalkan fungsi PR. Aktivisme dianggap sebagai katalis untuk pertumbuhan dan perkembangan PR (Benedict 2017).

Literatur-literatur PR perlahan mulai berkembang. Jika sebelumnya aktivis dianggap sebagai antagonis dalam organisasi karena pada umumnya para aktivis melihat bahwa kelompok yang dominan dianggap sebagai sebuah hambatan untuk mencapai tujuan dan hambatan tersebut harus dihilangkan dengan cara koersif yang khas. Kemudian pada perkembangannya, mereka dianggap sebagai praktisi PR yang memperjuangkan hak-hak mereka. Seperti menurut Martin (2007), sebenarnya banyak aktivisme yang melakukan pergerakan dengan tenang dan positif. Hal ini biasanya dilakukan oleh individu, bisnis, organisasi non pemerintah yang bertujuan membantu orang atau masyarakat yang tidak memiliki kekuatan. Dalam praktiknya, aktivisme dan PR menjadi dua hal yang tidak terpisahkan. Aktivisme yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang akan menjadi stimulasi bagi organisasi untuk mengembangkan sebuah konsep PR yang lebih baik (Brooks et al. 2018; Heath

and Toth n.d.). PR dan aktivisme merupakan bagian integral dari proses komunikasi simetris dua arah. Aktivisme dan PR tidak selalu berlawanan, namun seringkali adalah dua hal yang identik.

Sebuah gerakan aktivis terjadi dalam banyak lingkup dan permasalahan. Pergerakan yang dilakukan oleh para aktivis itu sebenarnya merupakan penerapan dari PR. Seperti yang dilakukan oleh Aliansi Ulama Pantura (AUP) dan pengelola pantai *Lon Malang* dengan aktivismenya dalam pengembangan pantai *Lon Malang* di Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Madura untuk menjadi sebuah destinasi wisata. Terjadinya konflik yang berkepanjangan antara pengelola pantai dan AUP terkait dengan pengembangan pantai *Lon Malang* sebagai sebuah destinasi wisata terjadi karena adanya pemahaman yang berbeda-beda dari kedua pihak tentang sebuah konsep wisata di Madura, terutama di Sampang. Selain itu, juga dipengaruhi oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masing-masing pihak untuk mempertahankan ideologinya.

Secara umum, Madura memiliki banyak potensi wisata. Seperti wisata alam, wisata religi, dan wisata budaya. Bahkan karena banyaknya potensi ini, Madura seringkali disebut sebagai *a hidden paradise*. Banyaknya potensi ini seharusnya mampu menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi Madura untuk menjadi sebuah destinasi wisata yang nantinya turut andil dalam perkembangan perekonomian dan menambah kesejahteraan bagi masyarakat. Karena itu dapat pula dikatakan, bahwa sektor pariwisata sebenarnya dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk mengentaskan kemiskinan di Madura. Namun sayangnya, sampai saat ini sektor pariwisata belum bisa menjadi andalan dalam memberikan sumbangan untuk pembangunan daerah-daerah di Madura sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dinamika isu wisata di Madura telah berlangsung lebih dari satu dekade. Kontestasi yang melibatkan segenap pemangku kepentingan terjadi dengan eskalasi yang dinamis. Seperti yang terjadi pada pertengahan tahun 2019,

warga Bangkalan, tepatnya masyarakat yang berdomisili di dekat Suramadu mendatangi kantor DPRD Bangkalan untuk menyampaikan penolakan mereka atas dibangunnya destinasi wisata di kawasan kaki Suramadu Sisi Madura. Penolakan terhadap pengembangan wisata lainnya sempat dilakukan oleh sekelompok kiai dan tokoh masyarakat di Kabupaten Sampang pada tahun 2010 terhadap di bangunnya sebuah hotel di daerah wisata pantai Camplong (<https://www.tribunnews.com/>). Beberapa faktor ditengarai menjadi penyebab dialektika ini, salah satunya adalah faktor sosial dan budaya. Potret demografis masyarakat Madura dengan latar pesisir menyebabkan masyarakat Madura memiliki perilaku sosial dengan keberanian tinggi, menjunjung tinggi martabat dan harga diri, serta berjiwa keras (Wiyata 2002). Hal inilah yang sering memicu terjadinya konflik di Madura. Sedangkan dalam perspektif afiliasi dan keyakinan, masyarakat Madura dominan menganut agama Islam yang sangat kuat dan dalam pemahaman terhadap isu-isu relatif sangat sensitif dan seringkali memberikan respon yang cukup keras terhadap hal-hal yang dianggap akan merusak marwah agama.

Berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata di Madura, kondisi wisata di Madura tidak dapat dilihat secara parsial. Banyak hal penting lain yang harus menjadi perhatian, diantaranya adalah tentang sistem sosial di Madura. Sistem sosial merupakan tindakan-tindakan yang terbentuk dari interaksi sosial berbagai individu yang tumbuh dan berkembang diatas standar penilaian umum yang disepakati bersama oleh seluruh anggota masyarakat (Nasikun 2003). Sistem sosial merupakan aturan yang menjadi acuan tata laku masyarakat. Karena itulah, berkaitan dengan sistem sosial, pengembangan pariwisata di Madura juga harus memperhatikan penerimaan masyarakat di lokasi wisata. Hal ini bahkan bisa dikatakan sebagai hal yang paling krusial diantara hal lainnya. Memahami pola pandang, sistem nilai, dan kearifan yang dianut oleh masyarakat Madura,

mutlak harus dilakukan untuk membangun kesepahaman dengan mereka dalam upaya pengembangan industri pariwisata di Madura.

Wacana pengembangan pariwisata di Madura yang akhir-akhir ini menjadi agenda utama pemerintah daerah masih selalu bertemu banyak rintangan yang datang dari banyak kepentingan. Salah satunya adalah kekhawatiran kiai akan rusaknya akhlak islami generasi muda Madura karena terkontaminasi budaya luar yang masuk ke Madura seiring dengan adanya pengembangan pariwisata. Contohnya, lokasi wisata Pantai Camplong di Kabupaten Sampang yang sebenarnya telah mulai diupayakan perkembangannya dengan menggandeng pihak swasta sejak tahun 1992, sampai saat ini tidak tampak ada perkembangan yang signifikan. Begitu juga dengan pantai Lombang di Kabupaten Sumenep. Pada hari-hari tertentu saat Pantai Lombang ramai dikunjungi wisatawan, masyarakat setempat justru membuat acara tandingan, yaitu istighosah sebagai bentuk penolakan secara halus terhadap pariwisata (Karim 2015).

Dalam pengembangan pariwisata di suatu daerah, setidaknya ada tiga elemen yang harus terlibat di dalamnya, yaitu masyarakat, swasta, dan pemerintah (Simanjuntak 2017). Pengembangan destinasi wisata akan berjalan dengan sempurna jika tiga elemen ini bisa membaaur menjadi satu dan mampu bekerjasama dengan baik. Pada umumnya dalam sebuah tatanan masyarakat, ada pemimpin yang bertugas untuk mengkoordinasi sebuah kerjasama. Terkait dengan kepemimpinan, masyarakat Madura mengenal hierarki kepatuhan yang unik dan tidak bisa ditawarkan dalam filosofis *Buppa' Babbu'*, *Guru*, *Rato*, (bapak ibu, guru/kiai, pemerintah)(Rozaki 2004). Dalam deretan filosofis tersebut tampak bahwa dalam lingkup kecil, yaitu didalam keluarga, yang paling dihormati adalah bapak ibu. Sedangkan pada lingkup kehidupan sosial, kiai/guru diletakkan pada posisi setelah orang tua sebagai pemimpin informal. Kepemimpinan formal, dalam hal ini pemerintah, ditempatkan pada urutan

terakhir. Dalam tataran praktisnya, masyarakat Madura tidak akan melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh pemerintah sebelum mendapatkan persetujuan dari kiai. Sebaliknya, mereka akan melakukan segala yang diperintahkan oleh kiai walaupun tanpa persetujuan pemerintah.

Catatan menarik dalam kepemimpinan di Madura, bahwa sebagian besar pemangku kepentingan di Madura berlatar belakang kiai, putra seorang kiai, atau minimal seorang santri. Sehingga hal ini juga menjadi tambahan kompleksnya permasalahan yang terjadi di Madura, yaitu tumpang tindihnya berbagai macam kepentingan. Hal lainnya yang seringkali memicu persoalan di Madura adalah falsafah hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat Madura, yaitu *lebbi bagus pote tolang ketembeng pote matah* (lebih baik putih tulang daripada putih mata) yang maknanya adalah lebih baik mati daripada menanggung malu (Wiyata 2002). Hal ini berlaku juga terhadap kuatnya sikap masyarakat Madura dalam mempertahankan keyakinan yang mereka anggap benar hingga titik darah penghabisan, termasuk keyakinan mereka terhadap kebenaran absolut semua perkataan kiai.

Masalah lainnya yang rentan mendatangkan konflik di Madura adalah masalah pariwisata. Bagi sebagian besar masyarakat Madura yang memegang teguh ajaran-ajaran Islam, pariwisata hanya merupakan kesenangan dan kesia-siaan yang mendatangkan banyak *mudharat*. Karena itulah pengembangan industri wisata di Madura selama ini selalu dibayang-bayangi konflik. Kekhawatiran masyarakat, terutama kiai, bahwa perkembangan pariwisata akan merusak kondisi sosial budaya di Madura terutama dalam kaitannya dengan ketaatan beragama, membuat kiai sebagai penjaga marwah agama Islam dan panutan masyarakat serta sebagai pimpinan informal bagi mereka, selalu melakukan perlawanan dan penolakan pada rencana-rencana pengembangan pariwisata. Kiai akan menolak setiap unsur eksternal yang dianggap bertentangan dengan nilai atau pola pandang yang mereka yakini. Karena nilai-nilai yang

dianut kiai secara umum tidak hanya bersifat material saja, namun juga ada unsur metafisik yang berhubungan erat dengan emosi masyarakat yang akhirnya muncul dalam sebuah bentuk penolakan, perlawanan, dan akhirnya tercipta konflik dalam masyarakat.

Konflik yang sampai saat ini masih terus berlanjut dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan kiai adalah tentang pembukaan destinasi wisata baru di Kabupaten Sampang, yaitu pantai *Lon Malang* di desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Pantai *Lon Malang* merupakan pantai berpasir putih yang ada di dusun *Lon Malang* Desa Bira Tengah. Sejak desa ini dipimpin oleh kepala desa yang saat ini menjabat, pantai yang dulunya tidak terurus mulai mendapatkan perhatian yang serius untuk dikembangkan menjadi sebuah destinasi wisata baru. Kepala desa mengajukan proposal pembukaan destinasi wisata baru untuk pantai *Lon Malang* pada awal kepemimpinannya, yaitu awal tahun 2016. Namun saat itu, Pemerintah Kabupaten Sampang belum memberikan tanggapan serius karena sedang disibukkan dengan rencana peresmian Waduk Nipah.

Pada perkembangannya, dengan menggandeng Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang, kepala desa berhasil melakukan beberapa perubahan pada pantai *Lon Malang*. Yaitu konservasi laut dengan menanam cemara udang, terumbu karang buatan, membentuk Pokwasmas (Kelompok Pengawas Masyarakat) Putra Bahari, dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), serta pembangunan fisik lainnya seperti toilet, gubuk-gubuk peristirahatan, dan warung ikan bakar. Perubahan yang terjadi pada pantai *Lon Malang* mulai menarik minat masyarakat untuk datang, dari luar Sampang bahkan dari luar Madura. Tentu saja, maraknya penggunaan media sosial ikut memberikan peran dalam menciptakan *awareness* masyarakat tentang keberadaan pantai *Lon Malang*.

Ketenaran pantai *Lon Malang* dan ramainya pengunjung di pantai tersebut akhirnya mendapatkan perhatian dari Bidang Pariwisata Disporabudpar. Pada bulan April tahun 2016, Kasi Pariwisata beserta jajarannya datang melakukan survei ke lokasi untuk merespon proposal yang pernah diajukan kepala desa untuk pembukaan destinasi wisata baru di Sampang. Pengembangan dan pengelolaan mulai dibicarakan. Namun ternyata, rencana tersebut mendapatkan respon negatif dari para kiai. Tidak hanya kiai desa Bira Tengah yang melakukan penolakan, namun penolakan ini mengatasnamakan Aliansi Ulama Pantura (AUP) yang tidak hanya datang dari kiai di Sokobanah, namun juga dari Banyuates, Robatal, dan Ketapang. Beberapa alasan dari para kiai adalah :

1. Jam operasioanl pantai yang hingga larut malam.
2. Laporan masyarakat yang sering menemukan pasangan mesum di pantai tersebut bahkan sebelum pantai ini seramai saat ini.
3. Kekawatiran para kiai terhadap dekadensi moral remaja terutama dari para santri di daerah Sokobanah dan sekitarnya yang juga pernah ditemukan berkunjung ke pantai tersebut terutama ketika liburan pesantren.
4. Beberapa tulisan yang ada di pantai dan memang sengaja dibuat oleh pengelola untuk *spot* foto, menjurus pada hal-hal negatif (cenderung mesum), seperti : Papa pulang, mama basah (Arsip notulensi rapat Disporabudpar Kabupaten Sampang).

Dalam beberapa media, cetak maupun *online*, peneliti menemukan beberapa berita yang mengulas pantai *Lon Malang*. Berita-berita yang ditulis, sebagian besar adalah berita tentang aktivisme yang dilakukan oleh Aliansi Ulama Pantura untuk menolak rencana pengembangan pantai *Lon Malang* untuk menjadi sebuah destinasi wisata baru di Kabupaten Sampang. Selain itu, juga ada beberapa pemberitaan tentang beberapa kerjasama yang dilakukan oleh pihak pengelola dalam rencana pengembangan pantai *Lon Malang* untuk menjadi

sebuah destinasi wisata. Seperti kerjasama yang dilakukan dengan Kementerian Desa dan Dinas perikanan. Berita lainnya juga memuat tentang bantahan-bantahan yang diberikan oleh pihak pengelola terkait dengan berita-berita negatif yang beredar sebelumnya tentang pantai *Lon Malang*. Seperti berita dalam <http://koranmadura.com> tanggal 7 September 2017 yang menulis tentang dugaan beberapa elemen masyarakat, terutama para ulama, bahwa keberadaan pantai *Lon Malang* hanya menjadi tempat berbuat mesum. Berita lainnya terkait pantai *Lon Malang* ditulis media online <http://faktualnews.com> pada tanggal 12 September 2017 dengan judul “*Ulama tolak destinasi wisata Lon Malang di Sampang*”. Dalam pemberitaan ini, Seksi Dakwah dan Fatwa MUI Kecamatan Sokobanah yang Kabupaten Sampang sekaligus yang memotori lahirnya Aliansi Ulama Pantura, usai menggelar pertemuan tertutup dengan Bupati Sampang memberikan komentar bahwa pihaknya sama sekali tidak menolak program pemerintah untuk mendongkrak perekonomian Sampang. Namun menurutnya, mendongkrak perekonomian melalui pengembangan wisata yang banyak mengandung kemaksiatan adalah hal yang tidak dapat dianggap benar dan masih banyak cara lain yang bisa dilakukan untuk pengembangan ekonomi masyarakat.

Berita lainnya diturunkan oleh Radar Sampang pada tanggal 7 November 2017. Berita dengan judul “*Belasan Kiai Lurug DPRD:Persoalkan Pengelolaan Wisata di Sokobanah*” ini semakin memperjelas gerakan penolakan yang dilakukan AUP dalam menolak rencana pembukaan destinasi wisata pantai *Lon Malang*. Dalam berita ini, para ulama melakukan audiensi dengan DPRD dan aparat Pemerintah Kabupaten Sampang yang diwakili oleh Kasi Pariwisata Disporabudpar Sampang sehubungan dengan ketidaksetujuan mereka terhadap pembukaan pantai *Lon Malang*.

Gerakan penolakan yang dilakukan oleh kiai yang resah terhadap dibukanya pantai *Lon Malang* akhirnya juga sampai pada pemerintah Kabupaten Sampang. Melalui Bidang Pariwisata Disporabudpar, audiensi kemudian

dilakukan. Tercatat hingga saat ini sudah empat kali audiensi dilakukan dengan beberapa pihak yang berkepentingan, yaitu (1) AUP dengan MUI Kecamatan Sokobanah dengan Bupati Sampang; (2) AUP dengan DPRD Sampang; (3) MUI dengan Pemkab dan DPRD Sampang; (4) MUI dengan Pemkab dan DPRD Sampang. Namun, hingga saat ini belum ada hasil berupa kebijakan yang bisa dijadikan acuan untuk pemecahan konflik yang terjadi antara pihak pengelola dengan AUP.

Dalam sebuah kesempatan audiensi, saat pihak pemerintah meminta bukti dari beberapa kecurigaan yang dimaksudkan oleh para kiai, seorang anggota DPRD menyanggah, bahwa permintaan bukti pada seorang kiai adalah hal yang tidak sopan dilakukan. Bahwa apa yang disampaikan oleh kiai adalah sebuah keniscayaan yang tidak perlu dipertentangkan dan dipertanyakan buktinya. Ungkapan ini sebenarnya sangat disayangkan, mengingat bahwa seorang anggota dewan yang merupakan wakil suara masyarakat dan pejabat publik harusnya bersikap netral dan tidak memihak.

Dalam situasi yang terjadi pada embrio pengembangan wisata pantai *Lon Malang* ini, peneliti berasumsi bahwa konflik dan khususnya penolakan yang dilakukan oleh para kiai diakibatkan oleh ketidakpahaman kiai terhadap pariwisata. Selain itu, komunikasi yang terjadi antara pihak pengelola dengan beberapa pihak terkait, selama ini kurang harmonis dan tidak transparan. Para kiai, sebagai pemimpin budaya di Madura juga merasa tersinggung karena pembukaan destinasi wisata pantai *Lon Malang* dilakukan tanpa sepengetahuan para kiai. Padahal sebenarnya, banyak hal positif yang bisa didapatkan masyarakat, tanpa terkecuali, ketika wisata itu dikelola dengan manajemen yang baik. Selain kesejahteraan dalam hal ekonomi, keteraturan akan tercipta seiring manajemen dan pengelolaan yang baik di lokasi wisata. Perbuatan asusila dan melanggar ajaran agama Islam yang dikhawatirkan akan semakin marak terjadi

di lokasi wisata, justru akan berkurang dengan pengawasan dan konsep pariwisata yang baik dan sesuai dengan budaya Madura.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang dipaparkan diatas, berdasarkan pemikiran Randall Collins (1975) tentang konflik, konflik seringkali terjadi karena adanya interaksi yang gagal diantara orang-orang atau diantara kelompok-kelompok yang berpotensi untuk terciptanya konflik. Hal lain yang memicu terjadinya konflik adalah stratifikasi sosial yang menghasilkan dominasi dan subordinasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, konflik yang dimaksud adalah *“two or more persons or groups manifest the belief that they have incompatible objectives”* (Kriesberg, 1998, dalam Prayogo, 2010). Definisi ini memberi ruang atas adanya dimensi rasional dari konflik. Karena konflik dalam penelitian ini merupakan wujud dari perbedaan dan pertentangan kepentingan, terutama dalam hal ekonomi. Konflik yang terjadi dalam pengembangan industri pariwisata ini bukan bertujuan saling menghancurkan. Namun lebih pada tujuan untuk memenangkan kepentingan.

Penelitian tentang konflik terutama yang berkaitan dengan pariwisata pernah ditulis oleh Jingjing Yang pada tahun 2013. Artikel yang berdasarkan pada hasil studi etnografi selama 12 bulan diantara Tuva dan Kazakh, yaitu daerah otonomi Xinjiang Uyghur, Cina. Dengan menggunakan teori Konflik Sosial dari Coser (1956), Yang melihat bahwa industri pariwisata menimbulkan berbagai bentuk konflik sosial dan aliansi yang berfluktuasi diantara para pemangku kepentingan di lingkungan lokasi wisata. Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik tersebut adalah wisatawan, pemerintah, pengusaha pariwisata, dan masyarakat setempat.

Kajian lain tentang upaya pembangunan desa pernah dilakukan oleh Tania Murray Li dengan judul *The Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia* (2012). Dalam hasil penelitian yang kemudian

menjadi sebuah buku ini, Tania Li memaparkan tentang bagaimana proses pembangunan dikonsepsi dan dilaksanakan. Menggunakan fakta etnografis dan historis mengenai upaya perbaikan kehidupan rakyat di Indonesia sejak masa kolonial hingga reformasi, yang dijalankan oleh pemerintah kolonial, pemerintah nasional, lembaga konservasi lingkungan, lembaga swadaya masyarakat dan Bank Dunia, Tania Li menunjukkan bahwa niat baik serta rencana hebat untuk memakmurkan kehidupan orang banyak tidak serta merta akan benar-benar terwujud. Pada banyak peristiwa, kehendak untuk memperbaiki kehidupan ternyata justru membawa sengsara berkepanjangan, karena Program pemakmuran itu sendiri tidak bebas nilai—masyarakat yang hendak dibangun bukan ruang kosong yang bisa diisi apa saja, sementara kelompok yang hendak membangun entah itu pemerintah, organisasi keagamaan atau LSM juga memiliki berbagai macam tujuan dibalik tindakannya.

Berkaitan dengan perang opini yang terjadi dalam pengembangan industri pariwisata di Desa Bira Tengah, masing-masing pihak yang terlibat berusaha meyakinkan masyarakat dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan dukungan terhadap pemahaman yang mereka yakini adalah yang paling benar agar tujuan dari keberadaan mereka bisa tercapai. Penelitian ini akan fokus pada aktivitas-aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh pengelola pantai *Lon Malang* dan AUP untuk mendapatkan dukungan bahkan untuk mempengaruhi masyarakat dalam upaya mencapai tujuan mereka. Dalam aktivisme yang dilakukan oleh mereka inilah, praktik-praktik PR menjadi semakin menarik untuk dikaji. Analisis PR kritis akan memberikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan kritis menyangkut aktivisme yang dilakukan oleh pengelola pantai *Lon Malang* dan kiai dalam aktivitas-aktivitas kultural yang belum pernah dikaji dalam *field study* PR atau Kehumasan di Indonesia selama ini.

Penelitian tentang *critical PR* belum banyak peneliti temukan dalam kajian-kajian sebelumnya terutama terkait dengan gerakan kelompok di Indonesia. Bahkan, peneliti sedikit menemukan satu teks *critical PR* pada buku yang ditulis oleh Rakhmat Kriyantono (2015) dengan judul *PR, Issue, & Crisis Management* (Pendekatan *Critical PR*, Etnografi Kritis, dan Kualitatif). Namun, dalam penelitian dengan pendekatan kritis yang dilakukan oleh Rakhmat pada krisis yang terjadi pada Lapindo ini menempatkan praktik PR sebagai sebuah metode komunikasi, yaitu, praktik PR dilakukan secara metodis, dalam arti terencana dan terstruktur dengan jelas karena adanya divisi PR pada PT. Lapindo dan Humas Pemerintah.

Selain penelitian yang dilakukan oleh Rakhmat (2015), penelitian tentang PR juga pernah dilakukan oleh Rina Juwita (2019) dengan judul *Discourse Technologist praktisi PR Tentang Program Corporate Social Responsibility Industri Pertambangan Batubara Di Kalimantan Timur*. Dalam penelitian yang dilakukan di perusahaan pertambangan batubara ini, dengan menggunakan metode penelitian analisis wacana Foucauldian, peneliti lebih fokus pada wacana CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa praktik CSR yang dilakukan oleh perusahaan sangat dipengaruhi oleh dimensi sosial-politik, ekonomi, dan budaya. Karena, CSR tidak hanya dilakukan sebagai pencitraan perusahaan semata, namun juga sebagai bagian dari strategi hegemoni untuk mendapatkan kekuasaan dan memenangkan negosiasi yang terjadi antara perusahaan, negara, dan masyarakat.

Selebihnya adalah penelitian-penelitian PR yang masih berkuat pada teori-teori lama yang hanya memposisikan PR sebagai sebuah fungsi manajemen yang hadir saat organisasi sedang ada pada situasi krisis. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini akan mengeksplorasi bagaimana praktik PR dalam perspektif yang berbeda. Seperti halnya yang disampaikan oleh Motion, 2005, bahwa tantangan praktisi PR saat ini adalah mampu menunjukkan bagaimana

praktik PR dengan strategi diskursif tertentu mampu melakukan hegemoni dari kelompok-kelompok tertentu yang berusaha mendapatkan persetujuan publik untuk sampai pada misi organisasi mereka. Dalam salah satu artikel yang ditulis oleh Judy Motion dan C. Kay Weaver, 2005, mereka menunjukkan bagaimana penelitian PR memberikan kontribusi untuk ikut menetapkan sebuah “rezim kebenaran”. Dalam sebuah contoh kasus di New Zealand tentang *Genetic Modification (GM)*, penelitian ini mereka lakukan dengan tidak hanya mencari informasi yang biasa-biasa saja, namun juga mencari informasi dengan menanyakan hal-hal yang jarang ditanyakan oleh peneliti lain sebelumnya. Peneliti menanyakan “bagaimana” dan “mengapa” hal tersebut bisa terjadi, mengapa mereka membentuk organisasi tersebut, bagaimana mereka menjalankan organisasi, dan untuk siapa mereka bekerja?.

Di Indonesia, belum banyak yang mengkaji PR dengan paradigma kritis. Paradigma yang berkembang dalam kajian PR selama ini adalah paradigma positivis-fungsionalis dengan bidang kajian yang masih berkuat pada PR sebagai fungsi manajemen dan terfokus pada *commercial* dan *non-commercial institutions*. Selain itu, selama ini aktivisme dan PR selalu dianggap sebagai dua kubu yang saling bertentangan. Aktivisme dianggap sebagai *pressure group* dan pembuat masalah yang harus dihadapi oleh organisasi melalui praktisi PR. Penelitian ini menempatkan aktivisme sebagai sebuah bentuk praktik PR yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk mencapai sebuah perubahan. Kelompok masyarakat dalam penelitian ini melakukan praktik-praktik PR yang dikemas dalam berbagai macam bentuk aktivisme untuk mempengaruhi masyarakat agar mengikuti dan mempercayai nilai-nilai dan ideologi kelompok tersebut. PR dan aktivisme dalam penelitian ini dikaji sebagai dua hal yang identik. Aktivisme yang selalu dianggap sebagai pemeran antagonis dalam praktik-praktik PR selama ini adalah bentuk dari praktik PR yang turut andil dalam memberikan pengaruh dalam perubahan sosial masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontestasi kepentingan yang terjadi antara pengelola industri pariwisata dan Aliansi Ulama Pantura (AUP) dalam kontroversi pengembangan destinasi wisata pantai *Lon Malang* di Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang?.
2. Bagaimana PR *activisms* yang dilakukan oleh pengelola dan Aliansi Ulama Pantura (AUP) dalam mempengaruhi kelompok masyarakat lokal untuk mendapatkan dukungan terhadap misi, ideologi, dan pencitraan dalam kontroversi pengembangan wisata pantai *Lon Malang* di Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang?.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengungkap kontestasi kepentingan yang terjadi antara pengelola pantai *Lon Malang* dan Aliansi Ulama Pantura (AUP) di Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan PR *activisms* yang dilakukan oleh pengelola dan Aliansi Ulama Pantura (AUP) dalam mempengaruhi kelompok masyarakat lokal untuk mendapatkan dukungan terhadap misi, ideologi, dan pencitraan dalam pengembangan destinasi wisata pantai *Lon Malang* di Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran untuk *cultural economic theory* dengan menemukan proposisi-proposisi dari aktivisme yang dilakukan oleh pengelola dan Aliansi Ulama Pantura sebagai praktik PR yang bisa memberikan alternatif teori untuk kajian PR secara umum.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk membuat sebuah konsep pariwisata yang dapat mengakomodasi

semua kepentingan dalam pengembangan pariwisata di Madura dan Kabupaten Sampang khususnya.

3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam membuat kebijakan-kebijakan tentang pariwisata di Kabupaten Sampang dan Madura secara umum.
4. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah kajian pariwisata, sosial budaya, dan komunikasi khususnya kajian PR dan sebagai *preliminary research* yang nantinya bisa menjadi rujukan para peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan yang sama dengan peneliti.